

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Urbanisasi merupakan sebuah fenomena global yang paling banyak terjadi di banyak negara-negara berkembang seperti Indonesia. Tingkat urbanisasi di Indonesia mencapai 56,7 % pada tahun 2020, dan diproyeksikan akan terus meningkat hingga 63 % pada tahun 2030 (Badan Pusat Statistik, 2023). Proyeksi urbanisasi di Indonesia menunjukkan transformasi besar dalam struktur demografi dan ekonomi. Meskipun urbanisasi membawa potensi pertumbuhan ekonomi, ia juga menghadirkan tantangan signifikan dalam hal perencanaan kota, penyediaan infrastruktur, dan keberlanjutan lingkungan. Kota merupakan wilayah yang dinilai dapat memperbaiki taraf hidup seseorang, didukung dari ketersediaan fasilitas yang memadai hingga banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia dibandingkan di pedesaan (Yuniarto, 2022). Hal ini mendorong masyarakat melakukan urbanisasi. Semakin tingginya angka urbanisasi otomatis akan memberikan dampak yang signifikan bagi perkotaan. Pertumbuhan penduduk yang semakin cepat merupakan salah satu akibat dari urbanisasi.

Meningkatnya pertumbuhan penduduk seringkali tidak diimbangi dengan penyediaan infrastruktur dan layanan perkotaan yang memadai. Akibatnya, muncul berbagai masalah di perkotaan dimana salah satunya adalah tumbuhnya permukiman kumuh. Istilah permukiman kumuh mengacu pada wilayah dimana kualitas lingkungan telah menurun dan standar hidup penduduk belum membaik

ditandai dengan rendahnya kualitas lingkungan (Fitri & Sulistinah, 2021). Keberadaan kawasan kumuh tidak hanya menimbulkan masalah lingkungan fisik, tetapi juga berdampak negatif terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat umum. Oleh karena itu, penanganan permukiman kumuh menjadi prioritas dalam agenda pembangunan perkotaan di berbagai daerah.

Pertumbuhan penduduk akan selalu diiringi dengan kebutuhan akan kawasan permukiman. Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat tidak selalu dapat diakomodasi oleh perencanaan kota dan penyediaan rumah yang layak, sehingga mempengaruhi pertumbuhan permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kualitas lingkungan sekitar masyarakat setempat, tetapi juga menimbulkan masalah-masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan lainnya yang lebih parah. Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pemerintah Indonesia telah mengembangkan program nasional pembersihan kawasan terkontaminasi yang dikenal dengan nama Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan layanan dasar di masyarakat sekitar untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, berkualitas tinggi, dan produktif (Perkim.id, 2020). Sejalan dengan program nasional tersebut, pemerintah kota Jambi juga telah menginisiasi berbagai program perbaikan kawasan kumuh. Namun, implementasi program-program tersebut seringkali menghadapi berbagai kendala.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang PKP, definisi dari Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana

dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (Perkim.id, 2020). Permukiman kumuh ini seringkali muncul di kawasan yang seharusnya tidak dapat digunakan untuk hunian, seperti di tepi sungai atau di bawah jembatan. Hal ini terjadi karena naiknya harga tanah dan lahan yang terbatas di daerah perkotaan. Terdapat tujuh kriteria yang menunjukkan adanya kondisi kekumuhan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018, tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh. Adapun kriteria kondisi kumuh adalah sebagai berikut:

1. Bangunan gedung, ditinjau dari aspek ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang, kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.
2. Jalan lingkungan, ditinjau dari aspek jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman, kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
3. Penyediaan air minum, ditinjau dari aspek akses aman air minum tidak tersedia dan/atau kebutuhan air minimal setiap individu tidak terpenuhi.
4. Drainase lingkungan, ditinjau dari aspek drainase lingkungan yang tidak tersedia, drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan, kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
5. Pengelolaan air limbah, ditinjau dari aspek sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis, prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.

6. Pengelolaan persampahan, ditinjau dari aspek prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis, sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.
7. Proteksi kebakaran, ditinjau dari aspek prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia dan sarana proteksi kebakaran tidak tersedia.

Kota jambi sebagai ibukota provinsi jambi tidak lepas dari permasalahan ini. Sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, pendidikan di provinsi jambi, kota jambi menjadi daya tarik bagi penduduk dari berbagai daerah sekitarnya. Peningkatan jumlah penduduk di kota jambi memberikan tekanan pada layanan perkotaan dan sumberdaya yang ada. Banyaknya penduduk yang tidak mampu mengakses perumahan layak, menjadikan mereka terpaksa tinggal di daerah-daerah dengan kondisi lingkungan yang buruk dan minim fasilitas. Saat ini, keadaan permukiman kumuh yang ada di provinsi jambi jauh dari ideal. Hal ini mengakibatkan menurunnya keanekaragaman hayati yang tidak dimbangi dengan pembangunan berkelanjutan dan praktik lingkungan yang tepat. Ketidakmampuan dalam memperbaiki kondisi kumuh jadi permukiman layak huni menjadi tantangan tersendiri bagi suatu wilayah dalam mengurangi kawasan kumuh. Perkembangan permukiman kumuh yang meningkat dipengaruhi oleh kurangnya pembangunan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan yang baik. Pada umumnya, permukiman kumuh tidak mempunyai sistem drainase yang baik, rumah penduduk yang dibangun kurang baik, dan mimimnya sarana kebersihan di kawasan tersebut (Saragih, 2019).

Dinamika pertumbuhan penduduk adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kawasan perkotaan, termasuk munculnya kawasan kumuh. Kota Jambi telah mengalami pertumbuhan penduduk yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Pertumbuhan ini tidak hanya disebabkan oleh faktor kelahiran alami, namun juga dampak negatif akibat peningkatan arus urbanisasi. Tabel berikut menunjukkan jumlah penduduk dan laju pertumbuhannya di kota jambi dari tahun 2018-2023.

Tabel 1 Jumlah Pertumbuhan Penduduk Kota Jambi Tahun 2018-2023

Tahun	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)
2019	604,7
2020	606,2
2021	612,2
2022	619,6
2023	627,8

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi (Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2024)

Data jumlah penduduk di Kota Jambi tahun 2020-2023 menunjukkan laju pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan yang lumayan signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data kependudukan yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Provinsi Jambi hingga desember 2023 sekitar 3,76 juta jiwa. Diantara beberapa kabupaten/kota yang ada di provinsi jambi, kota jambi adalah wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 637,51 ribu jiwa (16,95%) dari total penduduk (Fadhilurrahman, 2024). Hal ini mengindikasikan bahwa hampir seperenam dari seluruh penduduk jambi terkonsentrasi di wilayah Kota Jambi. Fenomena ini menggambarkan pola urbanisasi yang umum terjadi di

banyak wilayah di Indonesia, dimana ibukota provinsi cenderung menjadi magnet bagi penduduk. Namun konsentrasi penduduk yang tinggi ini dapat membawa tantangan tersendiri bagi Kota Jambi. Dengan hampir 17 % penduduk provinsi berada di wilayahnya, Kota Jambi harus mampu menyediakan infrastruktur, lapangan kerja, layanan publik, dan tempat tinggal yang memadai untuk jumlah penduduk yang besar ini.

Luas wilayah Kota Jambi sekitar 17,500 hektar, dengan jumlah penduduk sekitar 750 jiwa. Dari seluruh wilayah kota, sekitar 65 % wilayahnya telah dihuni oleh penduduk. Mahruzar, kepala Ahli Geologi provinsi Jambi menyatakan bahwa sekitar 968 hektar wilayah tersebut masih digunakan sebagai kawasan kumuh. Data ini diperoleh dari SK Wali Kota Jambi pada tahun 2016. Wilayah ini terbagi menjadi 61 wilayah, dengan batas wilayahnya menjadi satu-satunya wilayah otonomi yang paling penting. *“Selama enam tahun lebih, pemerintah Kota Jambi telah berupaya untuk menangani masalah kawasan kumuh ini, namun hingga saat ini masih terdapat sekitar 200 hektar yang memerlukan perhatian khusus,”* ujar Mahruzar. Selanjutnya, ia menyebutkan beberapa isu yang menjadi fokus utama upaya konservasi kumuh di Kota Jambi, yakni ada Legok, Kasang, Sulanjana, dan beberapa lagi (Amazihono, 2023).

Salah satu kawasan penting yang patut untuk dipertimbangkan dalam konteks masalah permukiman kumuh di Kota Jambi adalah Kelurahan Legok. Kelurahan Legok memiliki luas sekitar 198.000 hektar dan mayoritas penduduknya adalah petani, buruh kasar, wirawswasta, dan karyawan (bkkbn, 2017).

Tabel 2 Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Danau Sipin Tahun 2022

Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk
Selamat	7966
Sungai Putri	8298
Solok Sipin	9684
Murni	4906
Legok	12532
Total	43386

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Jambi (Jambi, 2023)

Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di kelurahan legok adalah sebanyak 12.532 Jiwa. Kelurahan legok memiliki jumlah penduduk paling banyak diantara desa/kelurahan lain yang ada di kecamatan danau sipin. Hal ini tentunya akan memicu berbagai permasalahan, baik itu permasalahan sosial, lingkungan, ekonomi, dan lain sebagainya. Tingginya jumlah penduduk di suatu wilayah bisa menjadi suatu keuntungan atau kerugian. Jika populasi di suatu wilayah melampaui kapasitas wilayah tersebut, maka akan menjadi beban wilayah itu sendiri (Agistya Risna Sari, 2021). Kepadatan penduduk yang ada di kelurahan legok menjadi hal yang penting untuk diperhatikan karena adanya ketidakseimbangan antara luas/kapasitas daerah yang tidak diimbangi dengan jumlah penduduk yang tinggi. Dalam proses pembuangan limbah di Kelurahan Legok, Danau Sipin masih banyak masyarakat membuang sampah sembarangan, baik di sekitar jalan, pinggir jalan, maupun di sungai. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan menjadi hambatan dalam pengelolaan sampah (*Pengelolaan Lingkungan Dan Tata Kelola Kawasan Wisata*

Menuju Legok Goes Green, 2023). Kondisi ini menggambarkan sebuah tantangan dalam pengelolaan sampah, dimana letak permasalahannya adalah kurangnya kesadaran masyarakat sehingga masalah ini perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah dan kerjasama dari semua pihak yang terlibat.

Dalam menetapkan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Jambi diatur dalam peraturan Walikota Nomor 166 Tahun 2016 dalam Peraturan Walikota tersebut telah ditetapkan sebanyak 38 kawasab kumuh yang terletak di 62 kelurahan dengan total luas kawasan kumuh 986,57 Ha. Kemudian pada tanggal 13 Februari tahun 2023 telah dilaksanakan kembali penghitungan dan penetapan pengurangan luasan kumuh program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Kota Jambi di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi. Berikut ini adalah Hasil Penghitungan Pengurangan Luasan Kumuh Kota Jambi Tahun 2022.

Tabel 3 Hasil Penghitungan Pengurangan Luasan Kumuh Di Kota Jambi Tahun 2022

No	Nama Kawasan Kumuh	Luasan SK Tahun 2016 (Ha)	Capaian Pengurangan Luasan Kumuh 2022 (Ha)	Sisa Luasan (Ha)
1.	Kawasan Kumuh Orang Kayo Hitam	10,06	10,06	0
2.	Kawasan Kumuh Beringin	23,02	20,57	2,45
3.	Kawasan Kumuh Cempaka Putih-Sei.Asam	45,41	45,41	0
4.	Kawasan Kumuh Lebak Bandung	3,71	3,71	0
5.	Kawasan Kumuh Talang Jauh	18,01	18,01	0
6.	Kawasan Kumuh Pakuan Baru	13,93	13,93	0
7.	Kawasan Kumuh Payo Lebar	3,41	3,41	0
8.	Kawasan Kumuh Jelutung	27,03	27,03	0
9.	Kawasan Kumuh Kebun Handil Jaya	4,12	4,12	3,24
11.	Kawasan Kumuh Suka Karya	3,41	3,41	0
12.	Kawasan Kumuh Kenali Asam Atas	2,60	0	2,60
13.	Kawasan Kumuh Legok	147,34	89,85	57,49
14.	Kawasan Kumuh Murni	14,04	14,04	0
15.	Kawasan Kumuh Solok Sipin	1,61	1,61	0

16.	Kawasan Kumuh Sejinjang	64,19	64,19	0
17.	Kawasan Kumuh Kasang	36,28	33,24	3,04
18.	Kawasan Kumuh Rajawali	29,41	9,7	19,71
19.	Kawasan Kumuh Kasang Jaya	9,97	0	9,97
20.	Kawasan Kumuh Tanjung Sari	51,72	44,75	6,97
21.	Kawasan Kumuh Tanjung Pinang	53,98	48,44	5,54
22.	Kawasan Kumuh Sulanjana-Budiman	55,13	55,13	0
23.	Kawasan Kumuh Payo Selincah	8,79	0	8,79
24.	Kawasan Kumuh Penyengat Rendah	41,13	41,13	0
25.	Kawasan Kumuh Teluk Kenali	14,16	14,16	0
26.	Kawasan Kumuh Buluran Kenali	18,09	18,09	0
27.	Kawasan Kumuh Pematang Sulur	36,16	36,16	0
28.	Kawasan Kumuh Telanaipura	2,55	2,55	0
29.	Kawasan Kumuh Rawasari	7,29	0	7,29
30.	Kawasan Kumuh Kenali Besar	13,64	0	13,64
31.	Kawasan Kumuh Bagan Pete	6,97	0	6,97
32.	Kawasan Kumuh Jelmu	12,14	12,14	0

33.	Kawasan Kumuh Mudung Laut	31,10	31,10	0
34.	Kawasan Kumuh Tengah	14,26	14,26	0
35.	Kawasan Kumuh Tanjung Johor	2,80	2,80	0
36.	Kawasan Kumuh Tanjung Pasir-Tanjung Raden-Pasir Panjang	70,54	70,54	0
37.	Kawasan Kumuh Arab-Melayu	23,91	23,91	0
38.	Kawasan Kumuh Ulu Gedong-Olak Kemang	54,78	54,78	0
	Total	986,57	838,88	147,7

Sumber: Data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Jambi

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa wilayah kumuh di kota jambi sebanyak 38. Terdapat 26 kawasan kumuh yang sudah berhasil ditangani oleh pemerintah sedangkan untuk sisanya ada 12 lagi yang belum berhasil ditangani. Adapun kawasan kumuh yang belum berhasil ditangani yaitu Kawasan Kumuh Beringin, Kawasan Kumuh Kebun Handil, Kawasan Kumuh Kenali Asam Atas, Kawasan Kumuh Legok, Kawasan Kumuh Kasang, Kawasan Kumuh Rajawali, Kawasan Kumuh Kasang Jaya, Kawasan Kumuh Tanjung Sari, Kawasan Kumuh Tanjung Pinang, Kawasan Kumuh Payo Selincah, Kawasan Kumuh Rawasari, Kawasan Kumuh Kenali Besar, dan Kawasan Kumuh Bagan Pete. Diantara kedua belas kawasan kumuh tersebut wilayah yang memiliki tingkat kekumuhan tertinggi ada di kawasan legok yang memiliki luas sebesar 57,49 Ha.

Pemerintah telah berupaya untuk menangani permasalahan permukiman melalui berbagai kebijakan dan program. Salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani masalah permukiman kumuh adalah Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 propinsi yang menjadi “platform kolaborasi” basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Program KOTAKU merupakan salah satu upaya strategis direktorat pengembangan Kawasan permukiman, Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka percepatan penanganan Kawasan kumuh dan Gerakan 100-0-100, adalah strategi pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat. Kota Jambi sendiri sudah melaksanakan kegiatan program Kotaku dalam penanganan Kawasan kumuh (Administrator, n.d.).

Pemerintah telah berupaya untuk menangani masalah permukiman kumuh di kota Jambi melalui berbagai kebijakan dan program yang telah dilaksanakan seperti pembangunan infrastruktur jalan dan lingkungan, program penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh, bedah rumah, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Upaya ini dilakukan oleh berbagai pihak yang terlibat yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Namun, upaya-upaya

tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal, sebagaimana terlihat dari masih adanya permukiman kumuh di kota jambi, termasuk di Kawasan Kumuh Legok. Kawasan Kumuh Legok berada di Kelurahan Legok yang memiliki karakteristik khas. Permukiman di Kelurahan Legok umumnya tumbuh secara organik, tanpa perencanaan yang matang, dengan kepadatan bangunan yang tinggi, kualitas infrastruktur yang buruk, dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah. Kondisi ini telah berlangsung cukup lama, dan upaya-upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah belum mampu mengubah kondisi tersebut secara signifikan. Permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Legok, Kota Jambi, menjadi menarik untuk dikaji lebih mendalam. Ariane Mirtaciana Sari, Kepala Bidang Kawasan Permukiman di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, menyatakan :

“Masyarakat di legok memiliki perilaku yang susah untuk ditangani, mereka sering merusak dan bahkan mencuri sarana yang dibangun oleh pemerintah seperti lampu jalan yang digunakan untuk menerangi jalan. Kelurahan legok juga merupakan kampung narkoba tertinggi di kota jambi. Kami sudah berupaya untuk menangani masalah permukiman kumuh disitu melalui program pemerintah seperti KOTAKU dan sudah berkolaborasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) ,dan Pemerintah Kota Jambi. Namun yang menjadi masalah adalah masyarakatnya. Kasus yang dimiliki oleh kelurahan legok ini membuat kebijakan atau program ini susah untuk diimplementasikan dengan maksimal.”

Pendapat ini memberikan gambaran tentang kondisi kelurahan legok sebagai kawasan kumuh yang agak sulit untuk ditangani oleh pihak pemerintah, dimana letak permasalahannya adalah perilaku masyarakat kelurahan legok. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penanganan permasalahan permukiman kumuh di kelurahan legok. Seharusnya masyarakat

harus ikut berpartisipasi aktif dalam memperbaiki kondisi mereka dan menciptakan lingkungan yang lebih baik. Menurut Arnstein (1969), partisipasi masyarakat dapat dikategorikan dalam delapan tingkatan mulai dari manipulasi hingga kontrol masyarakat (Arnstein, 2007). Dalam konteks perbaikan kawasan kumuh, bentuk keterlibatan yang ideal adalah ketika masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan program. Untuk memperkuat landasan teori dan metodologi penelitian ini, penting untuk meninjau berbagai studi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait kawasan kumuh. Berikut ini beberapa penelitian relevan yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, antara lain sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yaskinul Anwar dkk. (2021) berjudul Partisipasi Masyarakat Terhadap Penanganan Permukiman Kumuh Di Kampung Ketupat Kecamatan Samarinda Seberang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penanganan permukiman kumuh cukup tinggi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian dan pengawasan (Anwar & Setyasih, 2021).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Fadli Ibrahim, dkk. (2024) berjudul Analisis Perencanaan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Proyek Relokasi Kawasan Kumuh. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat penting antara stres dan kesehatan yang berkaitan dengan pekerjaan (K3) dengan kinerja karyawan, terutama dalam

kaitannya dengan proyek relokasi. Hasil studi risiko dan perumahan menunjukkan bahwa ada total sembilan kerentanan perumahan yang dapat diidentifikasi terkait dengan dua puluh lima risiko negatif. Pada tahap penilaian risiko, terdapat satu risiko berat, tujuh risiko sedang, dan dua risiko ringan. Risiko-risiko ini memiliki persentase penerapan sekitar 75 %, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar kegiatan utama melanggar peraturan dan standar kesehatan dan keselamatan kerja. Namun, 25% yang disebutkan di atas menunjukkan tingkat ketidakkonsistenan yang sangat tinggi dalam penerapan Alat Pelindung Diri (APD) dan program pemeliharaan rumah dan tempat kerja (Akhmad Fadli Ibrahim, Rahmawati Djunuda, 2024).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rusneni Ruslan, dkk. (2021) berjudul Strategi Pengendalian Perkembangan Permukiman Kumuh Di Kawasan Lingkungan Kecamatan Turikale Kabupaten Maros. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam mengidentifikasi faktor yang berkontribusi menggunakan analisis chi square, sedangkan untuk merumuskan strategi pengendaliannya menggunakan analisis SWOT. Temuan utama dalam penelitian ini adalah bahwa ada empat faktor yang dapat mempengaruhi terciptanya permukiman kumuh di kawasan mannaungi, yaitu faktor keluarga, pendidikan, mata pencaharian, dan pendapatan. Di sisi lain, status kepemilikan lahan tidak menjadi faktor yang signifikan dalam terbentuknya kawasan kumuh. Strategi yang digunakan adalah memanfaatkan sumber daya masyarakat untuk mendukung penanganan permukiman kumuh melalui program pemerintah terkait Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2016, meningkatkan

penanganan permukiman kumuh melalui implementasi Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 serta memanfaatkan inisiatif pemerintah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 (Ruslan et al., 2021).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh David Christian Hutagaol, dkk. (2023) berjudul Strategi Penanganan Sanitasi Di Permukiman Kumuh Dengan Pendekatan Partisipasi Stakeholder (Studi Kasus Kota Bima, Nusa Tenggara Barat). Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi antara metode penelitian kualitatif yang diterapkan pada metode Analisis Pemangku Kepentingan (SA) dan metode penelitian kuantitatif yang diterapkan pada metode Analisis Jejaring Sosial (SNA). Hasil dari penelitian yang dilakukan di Kota Bima yakni, 52 pemangku kepentingan yang memiliki kepedulian terhadap kesehatan masyarakat diidentifikasi termasuk 8 aktor kunci, 7 aktor penting, 6 aktor yang berminat, dan 9 aktor tambahan. Empat pemangku kepentingan yang berpengaruh yang juga merupakan aktor kunci diidentifikasi. Secara keseluruhan, kekohesifan semua jenis pekerjaan di Kota Bima tidak terlalu baik, yaitu 7,7 %. Penanganan sanitasi di permukiman kumuh Kota Bima memerlukan peningkatan kerja sama dengan perusahaan swasta, masyarakat, dan akademisi (Hutagaol et al., 2023).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Sanusi (2024) yang berjudul Implementasi Program Bersih, Sehat dan Berkah (Berseka) dalam Mengatasi Permukiman Kumuh. Metodologi yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif, dengan fokus kajian berdasarkan teori Merilee S. Grindle tentang implementasi kebijakan, yang terdiri dari kebijakan dan lingkungannya. Purposive sampling adalah teknik yang digunakan dalam pengumpulan informasi.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertahanan dan konsep program BERSEKA merupakan cerminan dari program KOTAKU dan jumlah anggaran dari APBD Kabupaten Bekasi. Implementasinya mengurangi minat masyarakat terhadap pembangunan fisik lingkungan dan meninggalkan kegiatan non-fisik yang belum selesai. Program BERSEKA telah berhasil mengurangi luasan kawasan kumuh dari 25, 05 Ha menjadi 6, 87 Ha. Faktor yang menghambat pelaksanaan adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sekitar yang mengakibatkan kurangnya dukungan terhadap KPP dan munculnya dualisme masyarakat. Faktor yang mendukung pelaksanaan program BERSEKA untuk pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum telah dimasukkan ke dalam RENSTRA 2023-2026 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi, disertai dengan solusi untuk mengatasi kawasan pemanfaatan umum yang ada yang terdiri dari sarana prasarana persampahan, sarana pemadam kebakaran, pembangunan drainase lingkungan, dan peningkatan sarana air bersih (Sanusi, 2024).

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Hadi, dkk. (2023) yang berjudul Evaluasi Kebijakan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh Di Kawasan Kota Lama Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode studi pustaka, yaitu metode pengumpulan data dengan mempelajari dan memahami teori-teori yang terdapat dalam literatur yang relevan dengan penelitian. Berdasarkan evaluasi administratif program KOTAKU di wilayah Kotalama Kota Pekanbaru, hanya ada

beberapa indikator signifikan yang menjadi catatan. Namun, yang menjadi permasalahan saat ini adalah tingkat partisipasi masyarakat yang relatif rendah pada tahap pelaksanaan dan pemeliharaan, karena program ini menitikberatkan pada kerjasama dan mobilisasi masyarakat (Ahmad Hadi, Hafzana Bedasari, 2023).

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Mimi Arifin, dkk. (2020) yang berjudul *Penyuluhan Dan Pendampingan Penataan Lingkungan Pada Permukiman Kumuh Di Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso, Kota Makassar*. Diskusi kelompok terarah (Focus group discussion) merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan dan permasalahan yang ada di masyarakat serta pemberian stimulus yang taat kepada masyarakat agar persepsi dan pemecahan masalah mengenai masyarakat dan kondisinya sesuai dengan harapan. Berikut ini adalah beberapa praktik yang direkomendasikan untuk mengatasi kondisi lingkungan: memasang lampu penerangan jalan, posko kebersihan di setiap lorong dan tepi kanal, membangun jalan landai di RW 1, RW 2, RW 3, dan RW 4 untuk memberikan akses ke trotoar, menyediakan tempat berteduh bagi wisatawan yang datang, dan mengatasi keinginan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan memasak, berkebun, dan membuat tempat berfoto untuk mendorong partisipasi wisatawan sehingga dapat meningkatkan PDB masyarakat (Arifin Mimi, dkk. 2020).

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Nuribadah (2023) yang berjudul *Strategi Keterlibatan Perempuan Dalam Penataan Kawasan Kota Tanpa Kumuh Di Kabupaten Bireuen*. Penelitian kualitatif yang menggunakan perspektif hukum empiris atau sosiologis adalah metodologi yang digunakan. Data deskriptif berupa

kata-kata lisan atau tertulis atau perilaku yang diamati dihasilkan oleh penelitian ini. Meunasah Capa, Meunasah Dayah, dan Meunasah Jangka Mesjid adalah tiga desa yang menjadi lokasi penelitian yang mengindikasikan bahwa teknik pelibatan perempuan dalam program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kabupaten Bireuen telah dipraktikkan. Perempuan berperan aktif dalam pengelolaan sampah dan diskusi program. Namun, hambatan utama yang dihadapi adalah kesibukan rumah tangga yang membuat mereka tidak dapat mendedikasikan seluruh waktunya untuk merencanakan program KOTAKU. Selain itu, sosialisasi program hanya sampai di tingkat kecamatan, dan pihak kelurahan menginginkan tanggapan yang lebih menyeluruh. Untuk pertumbuhan dan pencapaian kota bebas kumuh di masa depan di Kabupaten Bireuen, disarankan agar pemerintah menghapus prasangka terhadap perempuan dan mengikutsertakan mereka dalam proses pembuatan kebijakan di berbagai bidang, termasuk politik, sosial, dan budaya (Nuribadah, 2023).

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Anisa Riyulida & S. Sunarti (2019) yang berjudul Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Untuk Mendukung Wisata Kampung Pelangi Kota Semarang. Metode analisis menggunakan alat analisis kuantitatif dan kualitatif, metode analisis menggunakan pendekatan kuantitatif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perbaikan rumah dan peningkatan infrastruktur permukiman dilakukan sebagai bagian dari operasi peningkatan kualitas permukiman. Atap rumah dan sistem jalan merupakan perbaikan terbesar yang telah dilakukan. Gambaran sosial ekonomi masyarakat dan inisiatif pengembangan kualitas permukiman yang dilaksanakan untuk meningkatkan pariwisata Kampung Pelangi saling berkaitan dalam peningkatan ini.

Pendidikan masyarakat dan inisiatif untuk meningkatkan ventilasi rumah mereka memiliki hubungan terkecil, dengan nilai koefisien kontingensi sebesar 0,303 dan nilai chi-square sebesar 0,046. Untuk mempertahankan atraksi wisata di Kampung Pelangi, rumah ini harus berada dalam kondisi yang lebih baik dalam hal ventilasi. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan kapasitas masyarakat. Dengan nilai chi-square sebesar 0,028 dan nilai koefisien kontingensi sebesar 0,403, hubungan yang terbentuk antara kondisi tempat tinggal masyarakat dengan kegiatan pemeliharaan lingkungan di Kampung Pelangi cukup kuat dalam hal peningkatan infrastruktur permukiman. Untuk berkontribusi pada peningkatan infrastruktur yang mempromosikan fasilitas dan aksesibilitas wisata, pengembangan kapasitas masyarakat harus meningkatkan pengetahuan tentang kepemilikan rumah pribadi. Masyarakat akan terlibat dalam menjaga standar hunian dan infrastruktur permukiman mereka sebagai hasil dari pengembangan kapasitas ini. Untuk meningkatkan kualitas atraksi wisata, membuat Desa Pelangi lebih mudah diakses oleh pengunjung, dan mungkin meningkatkan pendapatan daerah dari pariwisata, permukiman yang lebih baik diciptakan untuk mendukung industri pariwisata desa (Anisa Riyulida, 2019).

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Amar Rizqi Annisa Yuniar (2022) yang berjudul Strategi Penataan Bangunan Di Kawasan Kumuh Tepian Sungai Kota Banjarmasin. Pendekatan penelitian ini, yang melihat langsung ke objek penelitian, yakni permukiman kumuh di sekitar Sungai Kelayan Kota Banjarmasin, menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif. Ketertiban bangunan, kepadatan bangunan, dan kelayakan bangunan menunjukkan hasil yang

masih tinggi dalam mendeteksi kondisi bangunan. Temuan-temuan ini mengarah pada pengembangan dua pendekatan yang sesuai untuk mengatasi masalah ini, strategi peremajaan yang didasarkan pada gagasan rumah vertikal dan rencana permukiman kembali mencakup pembangunan rusunami sebagai solusi. Kedua pendekatan ini seharusnya dapat mengatasi masalah permukiman kumuh dan juga masalah ekosistem sungai, yang telah menjadi kurang berfungsi sebagai akibat dari aktivitas lokal (Afdholy & Yuniar, 2022).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk menghadirkan penemuan baru dimana sebagian besar penelitian yang ada lebih fokus pada partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam konteks penanganan permukiman kumuh, tetapi tidak secara eksplisit mengkaji bagaimana *Collaborative Governance* dapat diimplementasikan dalam penangan kawasan kumuh. Penelitian ini dapat mengisi kekosongan dengan mengeksplorasi model kolaborasi antara pemerintah, dan masyarakat dalam konteks spesifik di Kelurahan Legok. Penelitian sebelumnya memberikan rekomendasi umum untuk penanganan permukiman kumuh, tetapi tidak secara spesifik mengembangkan strategi berbasis *Collaborative Governance*. Penelitian ini dapat mengembangkan strategi yang lebih berfokus dan aplikatif untuk penataan kawasan kumuh di Kelurahan Legok, dengan mempertimbangkan peran masing-masing pemangku kepentingan. Kemudian penelitian-penelitian sebelumnya dilakukan di lokasi yang berbeda (seperti di Kota Bima, Kabupaten Bireuen, dan Samarinda), sehingga hasil dan rekomendasi mereka mungkin tidak sepenuhnya relevan untuk konteks di Kota Jambi. Penelitian ini dapat memberikan wawasan

baru yang lebih relevan dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya di Kelurahan Legok.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik tertarik untuk mengangkat judul “ **Analisis Collaborative Governance Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Legok Kota Jambi** ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *Collaborative Governance* dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Legok, Kota Jambi?
2. Bagaimana peran dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Legok Kota Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memerlukan tujuan yang jelas agar tepat mengenai sasaran yang dikehendaki dan dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis melalui penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui penerapan *Collaborative Governance* dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Legok, Kota Jambi.

2. Menganalisis peran dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Legok Kota Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat tercapai. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya literatur dan pemahaman tentang konsep *Collaborative Governance*, khususnya dalam penataan kawasan kumuh perkotaan di Indonesia. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan model *Collaborative Governance* yang dapat diterapkan dalam mengatasi permasalahan perkotaan yang kompleks.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah Kota Jambi, khususnya dalam penataan kawasan kumuh di Kelurahan Legok. Kemudian dapat membantu para pembuat kebijakan dalam merancang dan mengimplementasikan program penataan kawasan kumuh yang lebih efektif dengan pendekatan *Collaborative Governance*. Penelitian ini juga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya masyarakat Kelurahan Legok tentang pentingnya partisipasi dalam proses penataan kawasan kumuh.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Konsep Ilmu Pemerintahan

Secara etimologis, pemerintahan berasal dari perkataan pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari perkataan perintah. Menurut kamus, kata-kata tersebut mempunyai arti sebagai berikut:

1. *Perintah* adalah perkataan yang bermaksud menyeluruh melakukan sesuatu.
2. *Pemerintah* adalah kekuasaan memerintah suatu negara (daerah negara) atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara.
3. *Pemerintahan* adalah perbuatan (cara, hal urusan dan sebagainya) memerintah.

Menurut Musanef, ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Suatu ilmu yang menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.
2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum, sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistem problema-problema sentralisasi, desentralisasi, koordinasi pengawasan ke dalam dan keluar.
3. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dan yang diperintah dapat diatur sedemikian rupa, sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dan mengusahakan agar terdapat

keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan, atau ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga diperoleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan negara.

Mengenai ilmu pemerintahan ini, U. Rosenthal mendefinisikan sebagai berikut di bawah ini:

De bestuurswetenschap is de wetenschap die zich uitsluitend bezighoudt met de studie van de interns en externe werking van de structuren en processen van het openbaar bestuur (ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang kinerja internal dan eksternal dari struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum).

Berdasarkan berbagai uraian di atas, Inu Kencana mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai berikut:

Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin di bidang legislasi, eksekusi dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah (Solihah & Djopari, 2017).

Keterlibatan publik menjadi salah satu aspek penting yang didorong oleh ilmu pemerintahan. Dengan adanya Collaborative Governane memperkuat keterlibatan ini dengan menciptakan ruang bagi dialog dan kolaborasi. Dengan demikian, pemerintah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, karena keputusan

yang diambil bersifat kolektif dan transparan. Selain itu, ilmu pemerintahan membantu dalam memahami masalah-masalah kompleks yang dihadapi oleh masyarakat, sementara *Collaborative Governance* menawarkan pendekatan holistik untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan melibatkan berbagai perspektif dan sumber daya. Melalui sinergi ini, pembelajaran bersama dan inovasi dalam praktik pemerintahan dapat tercipta, sehingga menghasilkan tata kelola yang lebih baik, responsif, dan inklusif dalam menghadapi tantangan yang ada.

1.5.2 Collaborative Governance

Collaborative Governance adalah instrumen yang digunakan untuk mengatasi suatu permasalahan publik yang melibatkan dua jenis aktor kebijakan yaitu aktor government dan aktor non-government. *Collaborative Governance* adalah sebuah paradigma yang menggerakkan pemangku kepentingan atau aktor-aktor non pemerintah yang terlibat dalam memformulasikan suatu kebijakan-kebijakan yang disepakati secara bersama sama (Noor et al., 2022). Ansel dan Gash dalam (Noor et al., 2022) mengistilahkan *Collaborative Governance* merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik.

Collaborative Governance adalah inisiatif atau strategi kebijakan publik yang mengakui kebutuhan para pemangku kepentingan dari berbagai sektor untuk berkolaborasi dan melaksanakan proyek atau program tertentu. Meningkatnya kesadaran akan mekanisme *collaborative governance* berawal dari potensinya

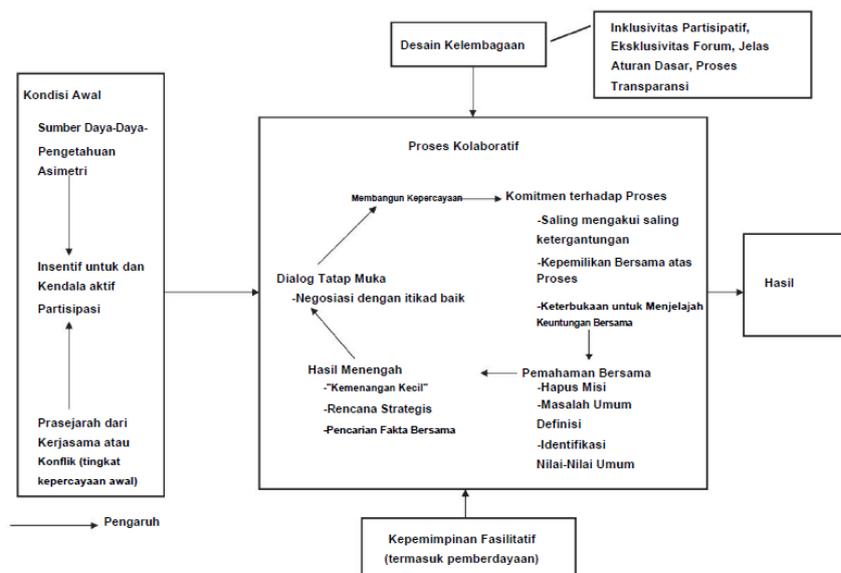
untuk memberikan manfaat bagi banyak pihak dalam menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan kapasitas dan legitimasi pemerintah (Noor et al., 2022). Ansell dan Gash dalam (Noor et al., 2022) mengatakan bahwa di dalam proses *Collaborative Governance* ada aktor yang terlibat di dalamnya yaitu pemerintah, masyarakat, swasta, lembaga non pemerintah, dan para intelektual kampus. Menurut Ansell dan Gash dalam (Noor et al., 2022). Definisi dari *Collaborative Governance* adalah sebuah pengaturan agensi publik yang secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam sebuah proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi pada konsensus, dan deliberatif dalam tujuannya untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program maupun aset publik.

A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets (Gash, 2014).

Hal ini menunjukkan bahwa adanya pergeseran paradigma dalam administrasi publik, dimana pemerintah tidak lagi dilihat sebagai satu-satunya aktor dalam pembuatan kebijakan dan penyediaan layanan publik. Sebaliknya, ada pengakuan bahwa masalah publik yang kompleks seringkali membutuhkan kerja sama lintas sektor dan pemanfaatan keahlian serta sumber daya dari berbagai pemangku kepentingan. Adanya kolaborasi di antara pemangku kepentingan menunjukkan adanya upaya sadar untuk melibatkan masyarakat, sektor swasta,

ataupun kelompok kepentingan lainnya dalam proses pemerintahan. Aktor yang lebih kuat akan dapat memanipulasi proses *Collaborative Governance* jika beberapa pemangku kepentingan tidak memiliki kemampuan, organisasi, status, atau sumber daya untuk berpartisipasi di dalamnya (Gash, 2014). Hal ini mengindikasikan bahwa dalam pengambilan keputusan dibutuhkan tingkat partisipasi dari setiap pemangku kepentingan atau aktor yang terlibat di dalam proses *Collaborative Governance*.

Gambar 1 Model *Collaborative Governance*



Model *Collaborative Governance* ini memiliki empat variabel besar, dimulai dari kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan dan proses kolaborasi. Variabel proses kolaborasi diperlakukan sebagai inti model dengan kondisi awal, desain kelembagaan, dan variabel kepemimpinan direpresentasikan sebagai kontribusi penting atau konteks untuk proses kolaborasi. Desain kelembagaan

menetapkan aturan-aturan dasar yang mendasari terjadinya kolaborasi, dan kepemimpinan memberikan mediasi dan fasilitasi penting untuk proses kolaborasi. Proses kolaborasi itu sendiri sangat bergantung dan nonlinier.

1) Kondisi awal

Keberhasilan sebuah kolaborasi sangat bergantung pada kondisi-kondisi awal yang ada. Dalam menganalisis kondisi awal kolaborasi, ada tiga faktor utama yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut:

a. Ketidakseimbangan kekuatan dan sumber daya antar pemangku kepentingan

Ketidakseimbangan kekuatan dan sumber daya antar pemangku kepentingan sering menjadi masalah serius. Ketika beberapa pihak tidak memiliki kapasitas, organisasi, atau sumber daya yang setara, proses kolaborasi berisiko dimanipulasi oleh pihak yang lebih kuat.

b. Insentif untuk berpartisipasi

Mengingat sifat kolaborasi yang umumnya sukarela, pemahaman tentang motivasi para pemangku kepentingan sangat penting. Insentif ini dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti harapan akan hasil yang nyata, ketersediaan alternatif lain untuk mencapai tujuan, dan tingkat ketergantungan antar pemangku kepentingan.

c. Sejarah hubungan antar pemangku kepentingan

Sejarah hubungan antar pemangku kepentingan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan sebuah kolaborasi. Menariknya, tingginya konflik tidak selalu menjadi penghalang

kolaborasi - kadang justru bisa menjadi pendorong yang kuat, terutama ketika para pihak sangat saling bergantung satu sama lain. ketika para pemangku kepentingan menyadari bahwa tujuan mereka tidak bisa dicapai tanpa bekerja sama dengan pihak lain - bahkan dengan mereka yang memiliki kepentingan bertentangan - kolaborasi bisa terwujud.

2) Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan merupakan elemen krusial dalam proses tata kelola kolaboratif. Para ahli sepakat bahwa kehadiran pemimpin yang efektif sangat penting untuk mengajak berbagai pihak berpartisipasi dan memandu mereka melewati tahap-tahap sulit dalam proses kolaborasi. Ada tiga bentuk “negoisasi terbantu” yang bisa diterapkan: fasilitasi sebagai bentuk intervensi paling minimal, mediasi yang lebih aktif ketika pemangku kepentingan kesulitan menemukan solusi win-win, dan arbitrase non-mengikat sebagai langkah terakhir. Pemimpin kolaboratif berperan sebagai pengelola proses yang fokus pada promosi dan pengamanan proses, bukan pada pengambilan tindakan individual yang tegas. Mereka harus memiliki kemampuan untuk mendorong partisipasi luas, memastikan pengaruh yang merata, memfasilitasi dinamika kelompok yang produktif, dan memperluas cakupan proses. Kolaborasi yang berhasil bisa melibatkan beberapa pemimpin, baik formal maupun informal. Ketika konflik tinggi dan kepercayaan rendah, tetapi dsitribusi kekuasaan relatif setara dan ada

insentif untuk berpartisipasi, *collaborative governance* bisa berhasil dengan mengandalkan jasa broker jujur yang diterima dan dipercaya semua pihak.

3) Desain kelembagaan

Desain kelembagaan dalam *Collaborative Governance* mengacu pada protokol dasar dan aturan main yang sangat penting bagi legitimasi prosedural. Salah satu isu esain yang paling mendasar adalah akses terhadap proses kolaborasi itu sendiri. Siapa yang harus dilibatkan? Para ahli menekankan bahwa proses harus terbuka dan inklusif termasuk melibatkan pemangku kepentingan yang mungkin “bermasalah”. Hanya kelompok yang merasa mendapat kesempatan legitimate untuk berpartisipasi yang akan mengembangkan komitmen terhadap proses. Keterwakilan yang lemah atau tidak inklusif dapat mengancam legitimasi hasil kolaborasi.

Namun, inklusivitas erat kaitannya dengan eksklusivitas forum kolaborasi. Ketika forum kolaborasi adalah “satu-satunya permainan di kota”, lebih mudah memotivasi pemangku kepentingan untuk berpartisipasi. Sebaliknya, ketika mereka dikecualikan, mereka mungkin terdorong mencari venue alternatif. Keberadaan forum alternatif sendiri bisa menjadi prasyarat negatif untuk kolaborasi yang efektif.

Aturan main yang jelas dan transparansi proses juga merupakan fitur desain yang penting. Kedua hal ini berkaitan dengan legitimasi prosedural dan pembangunan kepercayaan. Pemangku kepentingan sering memasuki proses kolaborasi dengan sikap skeptis, peka terhadap isu-isu kesetaraan, dan khawatir tentang kekuatan pemangku kepentingan lain. Aturan yang

jas dan diterapkan secara konsisten meyakinkan mereka bahwa prosesnya adil dan terbuka. Desain kelembagaan yang efektif harus menyeimbangkan berbagai kebutuhan dan tantangan untuk menciptakan proses kolaborasi yang legitimate dan berkelanjutan.

4) Proses kolaborasi

Ansel dan Gash menemukan bahwa proses kolaborasi sebenarnya lebih bersifat siklis daripada linear. Keberhasilan kolaborasi sering bergantung pada terciptanya siklus positif antara komunikasi, kepercayaan, komitmen, pemahaman, dan hasil. Proses yang bersifat siklis atau iteratif ini penting di semua tahap kolaborasi. Karena karakternya yang tidak linier inilah, proses kolaborasi sulit untuk digambarkan secara sederhana. Meskipun menggambarkannya sebagai siklus juga merupakan penyederhanaan besar, pendekatan ini membantu menunjukkan bagaimana umpan balik dari kolaborasi awal dapat memengaruhi kolaborasi selanjutnya secara positif atau negatif. Menurut Ansel dan Gash proses kolaborasi dilakukan melalui beberapa tahapan, mereka membagi tahapan-tahapan menjadi lima, yaitu sebagai berikut:

1) Face To Face (Dialog Tatap Muka)

Seluruh *Collaborative Governance* dibangun diatas dialog tatap muka antara para pemangku kepentingan. Sebagai proses yang berorientasi pada konsensus, komunikasi mendalam yang dimungkinkan melalui dialog langsung sangat diperlukan agar para pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi peluang untuk saling

menguntungkan. Namun, dialog tatap muka lebih dari sekedar media negosiasi. Ia merupakan inti dari proses menghancurkan stereotip dan hambatan komunikasi lainnya yang awalnya mencegah eksplorasi keuntungan bersama. Dialog tatap muka menjadi jantung dari proses membangun kepercayaan, rasa saling menghormati, pemahaman bersama, dan komitmen terhadap proses. Meskipun, dialog tatap muka bukan jaminan keberhasilan kolaborasi, ia merupakan landasan penting yang memungkinkan terbangunnya hubungan yang lebih dalam dan pemahaman yang lebih baik antar pemangku kepentingan.

2) Trust Building (Membangun Kepercayaan)

Kurangnya kepercayaan diantara para pemangku kepentingan sering menjadi titik awal dalam *Collaborative Governance*. Proses kolaborasi tidak hanya sekedar negosiasi, tetapi juga tentang membangun kepercayaan diantara para pemangku kepentingan. Hal ini menjadi sangat penting terutama ketika ada sejarah perselisihan sebelumnya. Meskipun membangun kepercayaan bukan fase terpisah dari dialog dan negosiasi tentang hal-hal substansial, pemimpin kolaborasi yang baik memahami bahwa mereka harus membangun kepercayaan diantara pihak-pihak yang berseberangan sebelum para pemangku kepentingan berisiko dimanipulasi. Jika terdapat sejarah antagonisme yang kuat, pembuat kebijakan pembuat

kebijakan atau pemangku kepentingan harus menyediakan waktu untuk membangun kepercayaan secara efektif.

3) Commitment To The Process (Komitmen Terhadap Proses)

Komitmen terkait erat dengan motivasi awal untuk berpartisipasi dalam *Collaborative Governance*. Namun, komitmen terhadap proses berarti mengembangkan keyakinan bahwa perundingan dengan itikad baik untuk keuntungan bersama adalah cara terbaik untuk mencapai hasil kebijakan yang diinginkan. Komitmen juga menciptakan dilema. Diperlukan kesediaan awal untuk mematuhi deliberasi, bahkan jika hasilnya tidak sepenuhnya didukung menjadi elemen penting karena komitmen bergantung pada keyakinan bahwa pemangku kepentingan lain akan menghormati perspektif dan kepentingan masing-masing. “kepemilikan proses” adalah dimensi tambahan dari komitmen. *Collaborative Governance* mengalihkan “kepemilikan” pengambilan keputusan dari lembaga ke pemangku kepentingan yang bertindak secara kolektif. Ini menyiratkan tanggung jawab bersama untuk proses tersebut, yang membutuhkan pemangku kepentingan untuk melihat hubungan mereka dengan pemangku kepentingan lain dalam perspektif baru. Saling ketergantungan yang tinggi antar pemangku kepentingan dapat meningkatkan insentif untuk bertindak manipulatif. Oleh karena itu, strategi *Collaborative Governance* sangat cocok untuk situasi yang membutuhkan kolaborasi berkelanjutan.

4) Shared Understanding (Pemahaman Atas Keputusan Bersama)

Dalam proses kolaborasi, para pemangku kepentingan perlu mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang dapat mereka capai secara kolektif. Pemahaman bersama ini memiliki berbagai istilah dalam literatur, seperti misi bersama, landasan bersama, tujuan yang jelas, arah yang jelas dan strategis, atau penyelarasan nilai-nilai inti. Pemahaman bersama juga dapat berarti kesepakatan dalam mendefinisikan suatu masalah atau kesepakatan tentang pengetahuan yang relevan untuk mengatasi masalah tersebut. Pengembangan pemahaman bersama ini merupakan bagian dari proses pembelajaran kolaborasi yang lebih besar. Para peneliti telah mengembangkan strategi survei yang berguna untuk menilai sejauh mana pembelajaran kolektif yang dihasilkan dari kolaborasi tersebut.

5) Intermediate Outcomes (Hasil Sementara)

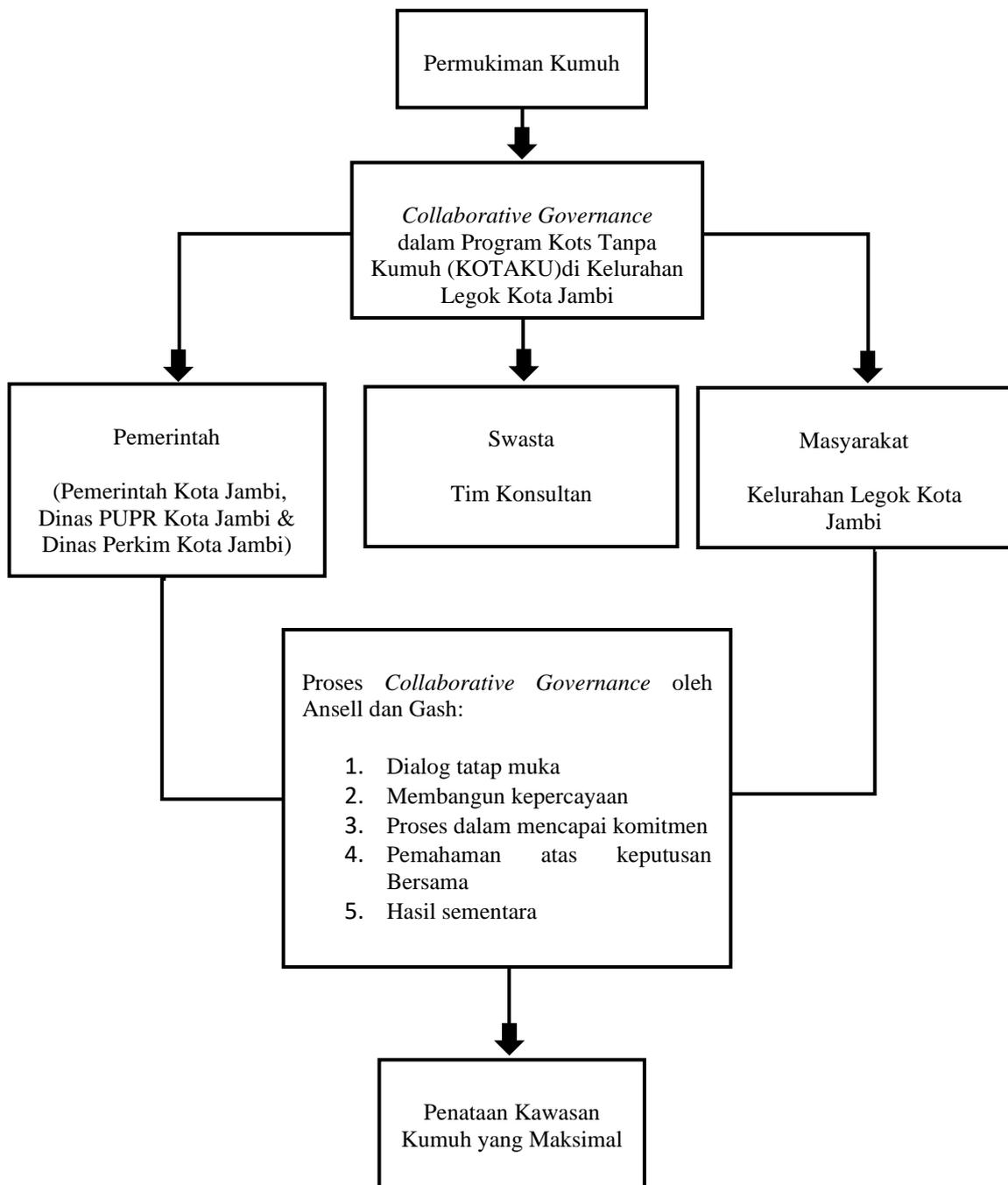
Beberapa studi kasus menunjukkan bahwa kolaborasi lebih mungkin terjadi ketika tujuan dan manfaat kolaborasi bersifat konkret dan memungkinkan tercapainya “kemenangan-kemenangan kecil”. Meskipun hasil antara ini dapat mewakili output nyata, hal tersebut merupakan hasil proses penting yang esensial untuk membangun momentum menuju kolaborasi yang sukses. Kemenangan-kemenangan kecil ini dapat memberikan umpan balik ke dalam proses kolaborasi, mendorong siklus positif dalam membangun

kepercayaan dan komitmen. Secara dini, eksploitasi bersama atas nilai keseluruhan dari kolaborasi dapat dibangun dengan kepercayaan (Ansell & Gash, 2018).

Mengingat adanya keterbatasan dalam hal waktu, sumber daya, dan ruang lingkup penelitian, fokus utama penelitian ini diarahkan hanya pada proses kolaborasi berdasarkan kerangka teoritis yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash. Meskipun demikian, peneliti tetap mempertimbangkan dan mengakui keberadaan unsur-unsur penting lainnya dalam dinamika kolaborasi, seperti kondisi awal, Kepemimpinan Fasilitatif, dan desain kelembagaan. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan kedalaman analisis yang memadai, sambil tetap menjaga perspektif yang komprehensif terhadap kompleksitas proses kolaborasi yang diteliti.

1.6 Kerangka Berpikir

Gambar 2 Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah Peneliti

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Prosedur dari penelitian kualitatif ini nantinya akan menghasilkan temuan yang diperoleh dari data-data yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai sarana. Metode penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang sedikit pun belum diketahui (Corbin, 2003). Penelitian ini berfokus pada peran dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan sehingga metode penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk melakukan wawancara mendalam yang dapat mengungkapkan pandangan dan pengalaman yang mungkin tidak terdeteksi dalam penelitian kuantitatif.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau objek untuk melakukan penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Legok yang berlokasi di Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Kelurahan Legok memiliki luas wilayah sekitar 198,00 Ha. Sebelah utara Kelurahan Legok berbatasan dengan Sungai Batanghari, sebelah selatan Kelurahan Legok berbatasan dengan Kel. Murni, sebelah barat Kelurahan Legok berbatasan dengan Kel. Sungai Putri, dan sebelah timur Kelurahan Legok berbatasan dengan Kel. Beringin Kec. Pasar Jambi. Kelurahan Legok terdiri dari 10 RT, yakni ada RT. 21, 22, 23, 24, 25, 32, 36, 39, 40, dan 42 (bkkbn, 2017). Kelurahan Legok memiliki tingkat permukiman kumuh

yang paling tinggi di Kota Jambi dibuktikan dengan data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi tentang pengurangan luas lahan kawasan kumuh di Kota Jambi. Data tersebut menunjukkan bahwa Kelurahan Legok merupakan kawasan kumuh dengan pengurangan luasan lahan terendah dan memiliki luas kawasan kumuh tertinggi se kota jambi. Oleh karena itu, penelitian di lokasi ini dipilih karena mempunyai potensi kekumuhan yang tinggi.

1.7.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan topik yang menjadi pusat perhatian dalam sebuah penelitian. Fokus penelitian dapat membantu menentukan arah penelitian serta tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah *Collaborative Governance* dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Legok Kota Jambi.

1.7.4 Sumber Data

Sebuah data tidak mungkin dapat diperoleh tanpa adanya sumber data. Data penelitian sendiri dapat dicari melalui berbagai sumber data, seperti dokumen, narasumber, peristiwa/kejadian, lokasi dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan berbagai informan yang terlibat dan memiliki pengetahuan tentang Program KOTAKU di Kelurahan Legok Kota Jambi. Selain wawancara, data primer juga akan diperoleh melalui observasi lapangan. Peneliti akan melakukan pengamatan

langsung terhadap lokasi-lokasi yang menjadi kawasan kumuh di Kelurahan Legok. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh data yang lebih akurat dan mendalam tentang kondisi lingkungan dan aktivitas penanganan di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini akan diperoleh dari berbagai dokumen dan laporan terkait Program KOTAKU di Kelurahan Legok Kota Jambi. Sumber data sekunder dalam penelitian ini juga diperoleh dari berita, artikel, internet atau media massa yang relevan dengan fokus penelitian. Data sekunder ini akan menjadi pelengkap dan penunjang bagi data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi lapangan.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan snowball atau bola salju. Snowball atau bola salju merupakan salah satu metode dalam menentukan informan pada penelitian kualitatif, dimana teknik ini efektif digunakan ketika populasi target sulit dijangkau atau tersembunyi. Oleh karena itu, informan yang dipilih dianggap paling mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti. Langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi informan kunci (key informan) yang memiliki pengetahuan mendalam terkait kawasan kumuh di Kelurahan Legok, Kota Jambi. Adapun informan kunci yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Kawasan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Jambi, instansi yang bertanggung jawab atas pengembangan dan penataan kawasan kumuh.
2. Kepala bidang Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jambi (BPPW JAMBI) sebagai penanggung jawab langsung dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman wilayah di Jambi serta sebagai pihak pelaksana program KOTAKU.
3. Tim Konsultan, sebagai pihak swasta yang ikut andil dalam program KOTAKU di Kota Jambi.
4. Lurah sebagai penghubung antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam memfasilitasi sosialisasi program KOTAKU dan informasi tentang kawasan kumuh.
5. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), sebagai lembaga masyarakat di tingkat kelurahan yang mewakili kepentingan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh.
6. Masyarakat, mereka dapat memberikan perspektif bagaimana penataan kawasan kumuh mempengaruhi mereka dan memberikan pandangan langsung tentang dampak penataan kawasan kumuh terhadap kehidupan sehari-hari.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah sesuatu peristiwa dimana ada proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung (Yusuf, 2017). Dengan kata lain, wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan dua pihak yakni pewawancara dan narasumber.

b. Observasi

Sutrisno Hadi dalam (Sugiyono, 2015) mengemukakan definisi dari observasi itu adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dengan demikian, teknik pengumpulan data dengan observasi berarti melakukan pengamatan terhadap berbagai proses ataupun gejala yang terjadi di lapangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data berupa dokumen. Peneliti akan mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen terkait, seperti laporan kawasan kumuh, peraturan dan kebijakan, data statistik, publikasi media massa, dokumen perencanaan dan anggaran, serta dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Studi dokumentasi akan memberikan informasi pendukung dan melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dipilih karena dapat memperoleh pemahaman yang holistik tentang fenomena yang diteliti. Proses analisis data akan dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga selesai. Menurut Miles & Huberman terdapat tiga tahapan yang dapat dilakukan dalam analisis data kualitatif antara lain sebagai berikut:

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Pada tahap ini, peneliti akan melakukan pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Reduksi data bertujuan untuk memilah dan memfokuskan data yang relevan dengan penelitian, serta membuang data yang tidak diperlukan.

b. Penyajian Data (Data Display)

Setelah mereduksi data, peneliti akan menyajikan data dalam bentuk yang sistematis dan terorganisir, seperti teks naratif, bagan, atau grafik. Penyajian data ini akan membantu peneliti dalam menganalisis dan memahami pola, hubungan, dan makna yang terkandung dalam data.

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)

Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti akan menginterpretasikan data yang telah disajikan dan mencari pola, hubungan, dan makna yang muncul dari data tersebut. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan terus diverifikasi

selama proses analisis berlangsung (Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, 2014).

1.7.8 Keabsahan Data (Triangulasi)

Triangulasi data dalam penelitian kualitatif ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Abdussamad, 2021). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis triangulasi metode, yakni suatu metode untuk menentukan hasil penelitian dengan menggunakan teknik analisis data berskala besar seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Hal ini merupakan aspek penting dalam penelitian kualitatif untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan temuan yang dihasilkan valid dan dapat dipercaya.